

“Membangun Komitmen Daerah untuk Meningkatkan Motivasi Provider”

ditujukan kepada Walikota/Bupati
seluruh Indonesia



prepared by

Pusat Humaniora

PHK2PM Surabaya

PENDAHULUAN

- Latar Belakang
 - AKI & AKB tinggi
 - Jampersal → strategi pembiayaan
 - Implementasi msh banyak kendala
 - Studi PMPK UGM, Badan Litbang
- Isu Kebijakan
 - “provider kurang termotivasi dalam memberikan pelayanan dengan Jampersal”



prepared by

Pusat Humaniora
PHK2PM Surabaya

- Tujuan → rekomendasi 'pilihan kebijakan' terkait komitmen daerah untuk meningkatkan motivasi provider
- Pendekatan → legal aspek legal
- Ruang Lingkup & Keterbatasan
 - dikhususkan pada provider pelayanan dasar kesehatan ibu & anak dalam Jampersal.
 - pelayanan dasar adalah bidan praktek swasta serta Puskesmas dan jaringannya.



prepared by

Pusat Humaniora
PHK2PM Surabaya

- Lokasi Studi (7 propinsi / 14 kabupaten/kota)
 - Jawa Timur, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku
 - Kab. Sampang, Kota Blitar, Kota Bandung, Kab. Bogor, Kota Batam, Kab. Natuna, Kota Balikpapan, Kab. Paser, Kota Kendari, Kab. Wakatobi, Kota Mataram, Kab. Lombok Tengah, Kota Ambon, Kab. Kepulauan Aru



prepared by

Pusat Humaniora

PHK2PM Surabaya

PERKEMBANGAN

- Perubahan Juknis → 2011 ke 2012
 - Kenaikan jasa pelayanan
- Tidak Ada Kebijakan Lokal
 - Tidak ada turunan kebijakan di tingkat lokal
 - Bogor, Balikpapan, Paser, Wakatobi, Kepulauan Aru, Mataram (akhir 2012 jadi Perwali)



prepared by

Pusat Humaniora

PHK2PM Surabaya

PERKEMBANGAN (2)

- Kebijakan Lokal Tidak Mendukung
 - Jasa pelayanan terlalu rendah → Ambon
 - Persyaratan sulit (SIP IBI) → Ambon
 - Tidak ada jasa pelayanan → Batam
 - Berbagi dengan dukun → Lombok Tengah



prepared by

Pusat Humaniora

PHK2PM Surabaya

IMPLIKASI KEBIJAKAN

- Tidak adanya turunan kebijakan → berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi antar aktor pelaksana lapangan
- Jasa pelayanan yang diterima tidak sama dengan besaran jasa pelayanan yang diatur Juknis
- Pencairan lambat
- Motivasi bidan kurang → gampang merujuk



prepared by

Pusat Humaniora
PHK2PM Surabaya

PILIHAN KEBIJAKAN

- Pilihan 1
 - Membuat Perda
 - Lebih kuat , tapi proses lama
- Pilihan 2
 - Membuat Perbup/ Perwali
 - Cepat



prepared by

Pusat Humaniora

PHK2PM Surabaya

Rekomendasi

Pilihan kebijakan yang paling memungkinkan untuk dengan cepat merespon dan dengan segera dapat diimplementasikan

Perwali/Perbup



prepared by

Pusat Humaniora

PHK2PM Surabaya

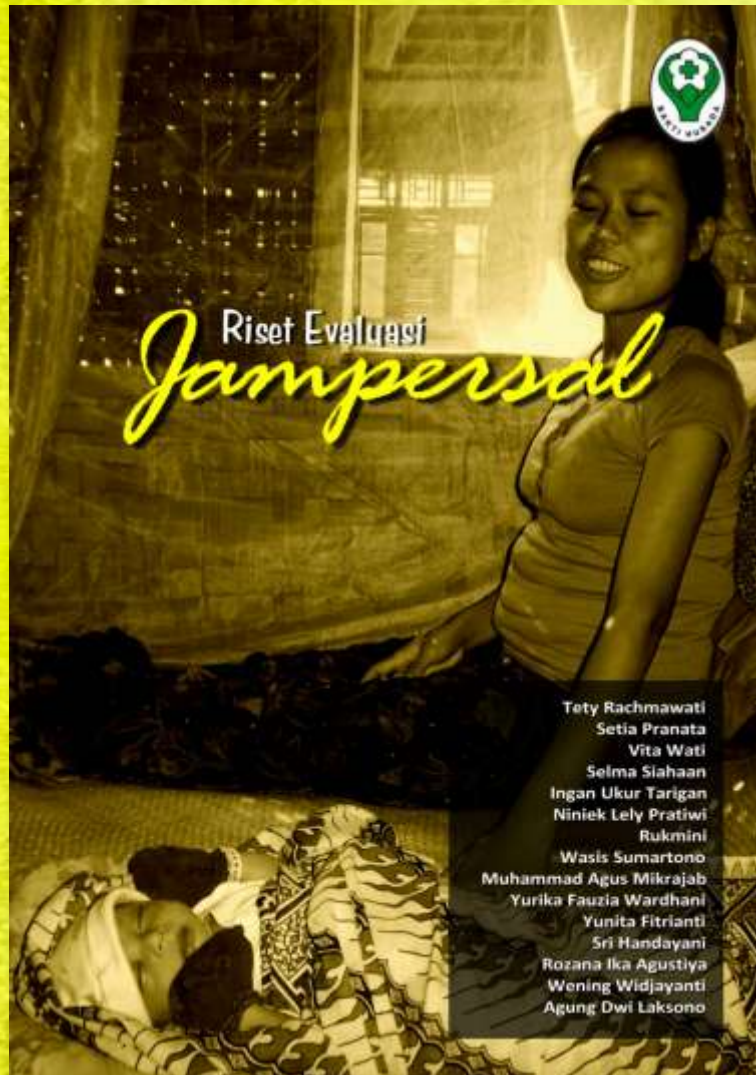
Rekomendasi (2)

- Menetapkan jasa pelayanan sesuai dengan Juknis, yaitu minimal 75% dari tarif pelayanan.
- Tidak memberikan syarat tambahan untuk mendapatkan pelayanan Jampersal.
- Menetapkan syarat bagi bidan yang ingin melakukan PKS sesuai dengan Juknis,
- dengan tetap memperhatikan sumber daya tersedia. Bila bidan yang tersedia 100% adalah lulusan P2B (D1), maka menjadi tidak cocok bila syarat yang ditetapkan hanya untuk bidan lulusan akademi (D3).



prepared by

Pusat Humaniora
PHK2PM Surabaya



Untuk keterangan lebih detail bisa dibaca pada buku “***Riset Evaluasi Jampersal***”.

Buku bisa didownload pada tautan berikut;

<http://www.scribd.com/doc/120760873/Riset-Evaluasi-Jampersal>

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



prepared by

Pusat Humaniora

PHK2PM Surabaya